

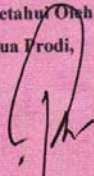
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PROSEDUR BELANJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA  
BUKITTINGGI

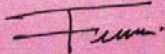
Nama : Annisa Utami Firley  
Nim : 57996  
Program Studi : Akuntansi (D III)  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2014

Diketahui Oleh  
Ketua Prodi,

  
Perengk Susanto, SE, M.Sc  
NIP. 19810404 200501 1002

Diketahui Oleh  
Pembimbing,

  
Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

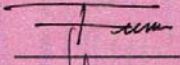
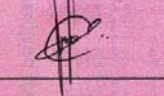
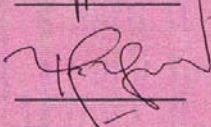
**ANALISIS PROSEDUR BELANJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA BUKITTINGGI**

Nama : Annisa Utami Firley  
Nim : 2010/57996  
Program Studi : Akuntansi (D III)  
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang**

Padang, Januari 2014

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak	(Ketua) 
2. Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak	(Anggota) 
3. Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	(Anggota) 

## **ABSTRAK**

### **Annisa Utami Firley: Analisis Prosedur Belanja dan Pertanggungjawaban Belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi**

Belanja dan Pertanggungjawaban Belanja seharusnya dilaksanakan secara transparan menurut yang telah diatur pada Permendagri untuk memungkinkan dilakukannya pengendalian yang efektif sehingga dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis prosedur Belanja dan Pertanggungjawaban Belanja Pada Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi sudah dilaksanakan dengan baik atau belum.

Penelitian ini adalah penelitian studi lapangan karena penelitian ini dimulai dari mengumpulkan data, mencari fakta, dan kemudian dianalisis berdasarkan landasan teori yang ada. Dengan mewawancarai pihak yang terkait, penulis juga mengumpulkan data langsung dari pihak terkait yang dianggap dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan mengenai prosedur belanja dan pertanggungjawaban belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pada Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi seperti pada bagian Umum dan Perkantoran. Pada bagian tersebut, memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dananya yang tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran(RKA). Maka, pada kendala ini diadakannya perubahan anggaran belanja yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) dan disahkan pada DPRD.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, serta salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan akhlakul karimah bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia.

Selama menyusun tugas akhir ini, banyak pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, do'a serta semangat. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tugas akhir ini :

1. Teristimewa untuk Ayah dan Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa dan dukungan yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc. Akselaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan membantu penulis dalam penulisan tugas akhir.
3. Bapak / Ibu dosen selaku staf pengajar pada Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
4. Karyawan/ti Program Diploma III FE UNP, terimakasih atas semua bantuan dan informasinya serta membantu dalam kelancaran administrasi penulis.

5. Buat saudara-saudaraku terima kasih atas perhatian, dukungan, semangat dan doanya yang selalu mengiringi setiap langkahku.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan, tata bahasa maupun pembahasannya, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Padang, Januari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
<b>A. Pengertian Prosedur .....</b>	<b>6</b>
<b>B. Klasifikasi Belanja .....</b>	<b>6</b>
a. Jenis Belanja dalam APBN .....	7
b. Jenis Belanja Barang.....	9
c. Belanja Tidak Langsung .....	10
d. Belanja Langsung.....	12
<b>C. Pengertian Pertanggungjawaban .....</b>	<b>16</b>
a. Siklus Pertanggungjawaban Publik.....	17
b. Contoh Pertanggungjawaban di Organisasi Sektor Publik .....	20
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Bentuk Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>C. Rancangan Penelitian .....</b>	<b>21</b>
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Jenis dan Sumber Data.....	22
3. Prosedur Penelitian .....	22
4. Objek Penelitian.....	23
5. Sumber Data.....	23
6. Teknik Analisis Data.....	26
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>

<b>A. Profil Instansi .....</b>	<b>27</b>
<b>B. Pembahasan.....</b>	<b>33</b>
1. Prosedur Belanja beserta kendalanya pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.....	34
2. Pertanggungjawaban Belanja pada Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi .....	44
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>48</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. Klasifikasi Belanja.....	21
-----------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

- 1. Struktur Organisasi**
- 2. RKA dan DPA**
- 3. Surat Observasi**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir (1998 s.d 2008) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik, khususnya reformasi manajemen daerah. Pada Era otonomi berlangsung selama 25 tahun sampai dengan pelaksanaan otonomi luas dan nyata berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang bersifat desentralisasi, *bottom up (participatif) planing & budgeting*, sistem pembukuan berpasangan (*double entry bookkeeping*) dan akuntansi basis kas modifikasi (*modified cash basis*).

Pada periode reformasi, hal yang akan diperhatikan tentang prosedur belanja pada SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi (Disdikpora), seperti untuk mewujudkan belanja Disdikpora yang ekonomis, efisien dan efektif maka perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen belanja Disdikpora secara cermat, konsisten dan berkelanjutan. Memang optimalisasi pengelolaan keuangan pada Disdikpora harus memperhatikan dua aspek, yaitu aspek pendapatan dan pengeluaran, tetapi manajemen belanja pada Disdikpora harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan manajemen pendapatan, sebab mengeluarkan uang jauh lebih mudah dibandingkan memperolehnya. Dalam kondisi tertentu, sering

kali menghemat anggaran lebih sulit dibandingkan mengejar target pendapatan

Manajemen belanja pada Disdikpora tidak lebih merupakan instrumen, teknik, atau metode. Oleh karena itu, manajemen belanja akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran, khususnya kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah daerah. Manajemen belanja Disdikpora harus berorientasi untuk mewujudkan tiga tujuan kebijakan ekonomi, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Dalam hal manajemen belanja terdapat kalimat yang penting untuk pengelola uang publik yaitu :

“Jika anda tidak dapat menghitung uang publik, Anda tidak dapat mengalokasikannya, dan jika Anda tidak dapat mengalokasikannya maka anda tidak dapat mengelolanya”. (Mahmudi,2010:80)

Perencanaan dan pengendalian belanja merupakan aktivitas penting yang harus dilakukan oleh SKPD, sebab belanja yang tidak terencana dan terkendali dengan baik pada dinas Pendidikan akan menjadi sumber inefisiensi dan pemborosan uang negara yang sangat merugikan instansi. Sebaliknya, pengelolaan belanja Disdikpora yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif akan memberikan dampak bagi kesejahteraan.

Pada rencana kerja Satuan Kerja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada renstra Disdikpora .

Renja pada Disdikpora Kota Bukittinggi tahun 2012 memuat target kinerja yang terukur baik sasaran maupun perdanannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Disdikpora maupun yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain. setelah dilaksnakannya renja pada Disdikpora, maka dibentuklah RKA ( Rencana Kegiatan Anggaran), DPA ( Dana Pelaksanaan Anggaran), dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban).

Pendapatan Disdikpora merupakan sumber untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung. Seharusnya, pengalokasian pendapatan pada Disdikpora ke belanja langsung harus lebih besar ke belanja tidak langsung. Hal ini dikarenakan belanja langsung merupakan suatu tindakan pengeluaran biaya untuk menciptakan pembangunan yang nantinya berguna untuk kesejahteraan staf. Namun, kebanyakan fenomena sekarang ini memperlihatkan bahwa pengalokasian belanja langsung lebih kecil daripada pengalokasian belanja tidak langsung.

Fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi (Disdikpora), penulis ingin mengetahui apakah prosedur belanja dinas terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung memang telah memenuhi syarat pada peraturan Permendagri yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mencari tahu bagaimana dan akibat dari prosedur belanja yang terjadi pada Disdikpora serta ingin mengetahui kendala Disdikpora dalam mengalokasikan belanjanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah berbentuk tugas akhir dengan judul “*Analisis Prosedur Belanja dan PertanggungJawaban Belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi*”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dihadapi adalah :

1. Bagaimana Prosedur Belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi?
3. Apa saja kendala-kendala yang terjadi pada belanja dan pertanggung jawaban belanja pada Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penulis ini adalah:

1. Menjelaskan Prosedur belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi.
2. Menjelaskan Pertanggungjawaban belanja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi.
3. Menjelaskan kendala-kendala yang terjadi pada belanja di Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti
  - a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Universitas Negeri Padang.
  - b. Dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan kemampuan analisis tentang pengelolaan anggaran belanja.
2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan :

Diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai prosedur belanja dan pertanggung jawaban belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.

  - a. Sebagai sumbangan ilmiah dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sebagai bahan informasi awal bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji bahan yang sama.
  - b. Dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi prosedur belanja dan pertanggung jawaban belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap prosedur Belanja dan Pertanggungjawaban Belanja Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi (Disdikpora) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur Belanja dan Pertanggungjawaban Belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi semua sudah dijalankan dengan baik. Prosedur belanja dan Pertanggungjawaban Belanja dilakukan dari Rencana Kerja masing-masing bidang pada Dinas tersebut, yang akan dibuat dasar dari pembuatan Rancangan Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing yang telah diketahui oleh PPTK ( Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk anggaran belanja setiap bidangnya. Setelah dari Rancangan Kegiatan Anggaran maka dibuatlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sebelumnya sudah dibahas terlebih dahulu pada RKA dan dituangkan ke DPA. Pada setiap bidang pada Disdikpora melaksanakan Pertanggungjawaban belanja pada masing-masing belanja yang telah dibahas sebelumnya pada DPA.
2. Kendala yang terjadi dalam prosedur belanja dan pertanggungjawaban belanja adalah pada Rancangan Kegiatan Anggaran seperti pada bidang umum dan perkantoran, membeli suatu barang yang tidak sesuai pada Dokumen Pelaksanaan Anggarannya atau melebihi pada anggaran belanja yang telah ditetapkan. Pada kendala ini, maka diadakan perubahan

anggaran belanja yang diajukan ke DPRD oleh DPKAD dan disahkan di DPRD.

## **B. Saran**

1. Belanja pada Disdikpora yang sudah dianggarkan harus tertuang semuanya dari Rencana Kerja yang ada dan juga sebaiknya Dokumen Pelaksanaan anggaran yang sudah digunakan tersebut tidak terlampau banyak terjadinya perubahan anggaran pada Disdikpora Kota Bukittinggi.
2. Dalam melaksanakan Surat Pertanggungjawabannya harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak boleh lagi adanya ketidakpatuhan dalam melaksanakan Surat Pertanggungjawaban pada masing-masing Bidang pada Disdikpora Kota Bukittinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2009. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi. 2009. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Munandar, M. 2007. *Budgeting*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Yusuf, A Muri. 2005. *Metodologi Penelitian*. Padang: UNP Press.